

## Modernisasi Sistem Pendidikan Nasional di Mesir

*(Telaah terhadap Reformasi Pendidikan Islam di Era  
Revolusioner Gamel Abdul Nasser Tahun 1952)*

**Saepudin Mashuri**

*Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Datokaam Palu*

### **Abstract:**

*This article is intended to pay attention about the nasional education system in revolution era of Egypt that was under Gamal Abdul Nasser president. In his government, the devalopment of education aspect took at intent reformation effort by locating support, not only in enough finance from budget of state, but also in official human being resource from government. In one side, his educational policies had given high contribution in building modern Mesir in intellect, social, and culture dimention. But, in other side, it were instrument of policy to take the interest of his government for the devalopment of national building in modern era of Egypt state. Some efforts which carried out during his government in education aspect are to integrate natural sciences at all Islamic education institution, to definite uniformed curricullum that had to be taught for nasionalism and sosialism ideology of Egypt in all elementaries dan scondaries school, to give the chance of learning for all of students without school fee, to build academic institution for producing technical and professional workers, and to reorganize for private and strange education institution that were in Egypt into national education system, including Islamic education system of al-Azhar university.*

**Kata Kunci:** Modernisasi, reformasi, sistem pendidikan, pemerintah revolusioner.

## **PENDAHULUAN**

Di dunia Islam, Mesir menjadi salah satu stereotipe pendidikan yang telah mewarnai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan di sebagian besar wilayah Islam sejak periode klasik, masa Mesir modern sampai era global dewasa ini. Pasca kemerdekaan merupakan momentum yang sangat berharga bagi mayoritas negara di Timur Tengah, termasuk salah satunya adalah Republik Arab Mesir dalam upaya menghembuskan angin modernisasi melalui gerakan reformasi di berbagai aspek kehidupan. Tahun 1952 menjadi *starting point* dimulainya gerakan revolusioner pada pemerintahan Mesir dengan melakukan penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dengan dicetuskannya berbagai kebijakan baru yang bersifat radikal dan universal terhadap perubahan orientasi pembangunan nasional Mesir modern. Nasser menetapkan beberapa kebijakan nasional yang mengcover seluruh dimensi kehidupan rakyat Mesir, dan salah satunya adalah kebijakan tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Dalam kebijakan pendidikan nasionalnya, Nasser mengintegrasikan universitas al-Azhar dan semua lembaga pendidikan lain yang dikelola oleh instansi swasta ke dalam satu institusi pendidikan modern yang memenuhi standar mutu internasional dengan tidak dipungut biaya (Ispatu Rofi dan Usman, 2000: 45).

Bukti sejarah yang sulit untuk dipungkiri, bahwa pada era Mesir revolusioner peran aktif Nasser dalam pembangunan Mesir modern telah memberikan andil yang sangat signifikan terhadap kemajuan dunia pendidikan, Gagasannya tentang pengadopsian ilmu pengetahuan dan teknologi Barat serta penjenjangan lembaga pendidikan Mesir secara sistematis telah memberikan motivasi kuat kepada dirinya untuk mengirim rakyat Mesir belajar ke luar negeri, seperti Jerman, Perancis, Belanda. Gerakan pendidikan berikutnya, Nasser menasionalisasikan semua lembaga pendidikan swasta dan asing yang terdapat di seluruh wilayah negara Mesir, termasuk perguruan tinggi Islam al-Azhar.

Di sisi lain, Nasser juga memproduksi sistem pendidikan yang berbau refresif, karena mengarah pada pemaksaan dan penekanan terhadap rakyat Mesir untuk menjalankan sistem pendidikan nasional yang dapat mendukung stabilitas nasional dan kepentingan politik pemerintahannya. Slogan yang dikembangkan untuk menyukseskan gagasan pendidikan nasionalnya adalah gerakan ideologi sosialisme dan nasionalisme arab yang banyak menakankan sosialisasi pengetahuan dan kurikulum yang bernuansa politik untuk melegitimasi kepentingan pemerintahannya.

Secara spesifik, Nasser telah mengusahakan agar pelajar Mesir dapat menikmati pendidikan secara merata. Penyatuan kurikulum dengan penambahan pelajaran umum yang sesuai dengan kemajuan zaman, penekanan pada pendidikan tehnik dan kejuruan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian tertentu. Demikian pula dengan peningkatan sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius pemerintah revolusioner, seperti pelatihan tenaga kependidikan dan tenaga administrasinya. Pada dasarnya, semua aktivitas pendidikan di masa Nasser, diselaraskan dengan kepentingan dan kebutuhan pembangunan negara, seperti kepentingan politik, stabilitas, sosial budaya, dan ekonomi.

Adalah tulis ini menelaah bagaimana kondisi pendidikan nasional di Mesir dan pengaruh kebijakan Nasser terhadap reformasi sistem pendidikan Islam di Mesir pada era revolusioner? Permasalahan ini perlu dikaji agar dapat memberikan wacana keilmuan yang lebih jelas tentang perubahan sistem pendidikan di Mesir sebagai negara yang dalam banyak diskursus ke-Islam-an menjadi kiblat dan model seluruh dunia Islam.

## **MESIR REVOLUSIONER DAN REFORMASI SISTEM PENDIDIKAN**

### **Pendidikan Nasional Mesir pada Era Transisi Kepemimpinan**

Tahun 1952 merupan *starting point* peralihan sejarah kehidupan bernegara di Mesir secara radikal. Peralihan itu telah diwarnai dengan polemik perebutan kekuasaan antara Raja Farouq dengan Gamel Abdul

Nasser yang berujung pada revolusi tanggal 23 Juli 1952 yang didalangi oleh Nasser dan beberapa orang koleganya.

Revolusi tahun 1952 di Mesir disambut baik oleh rakyat dan tentara, karena berhasil menyingkirkan kepemimpinan otoriter dan yang tidak dapat dipercaya di bawah Raja Farouq yang merupakan perpanjangan tangan "boneka" negara Inggris (Jhon L. Esposito, 1986: 176). Revolusi tersebut mengantarkan Mesir pada fase transisi kepemimpinan selama lebih kurang 4 tahun sampai Nasser resmi terpilih sebagai presiden Mesir tahun 1956.

Pada masa transisi kepemimpinan ini dapat dipahami bahwa Nasser menjadi figur yang sangat ambisius untuk menjadi orang nomor satu di Mesir. Fase ini mulai tahun 1956, ditandai dengan pengukuhan kekuasaan oleh kelompok revolusionis terhadap kepemimpinan Nasser melalui pembentukan kelompok pembebasan (*libration rally*) untuk menggalang dukungan melawan kelompok oposisi dalam masyarakat. Nasser juga tidak tanggung-tanggung membekukan dan membubarkan semua bentuk partai dan gerakan yang berpotensi menjadi rival politiknya dalam proses perebutan kekuasaan. Di dunia baru yang sangat refresif ini, tidak ada tempat bagi seorang ataupun kelompok pengeritik dan pembangkang, tokoh gerakan dan kaum intelektual yang memberikan perlawanan terhadap pemerintah dipenjara dan dihukum mati, seperti Gerakan Ikhwanul Muslimin (Peter Woodward, 1992: 36).

Sejak meletusnya revolusi Mesir tahun 1952, meskipun Nasser belum resmi memimpin Mesir, tetapi ia telah mulai mempromosikan visi dan misinya tentang motif dan orientasi negara Mesir modern. Dalam bidang politik, ia sangat gigih mempropogandakan slogan-slogan nasionalisme dan sosialisme arab, khususnya bagi rakyat Mesir dengan menetapkan kebijakan yang mengarah kepada pengabsahan dan penguatan posisinya sebagai pemimpin negara, melalui simbol-simbol tradisi keagamaan dan sosial-kemasyarakatan. Dalam berbagai sumber tentang revolusi Mesir, disebutkan bahwa Nasser adalah tokoh yang

diakui sebagai peletak dasar gerakan sosialisme arab, setidaknya di wilayah Mesir (Ensiklopedi Islam, 1993: 305).

Dalam bidang sosial-budaya, Nasser sangat tanggap untuk meresponi berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dengan cepat menyerap fenomena yang berkembang. Kelompok partai dan gerakan sosial yang dapat bersinergi dan berkerjasama dalam pemerintahannya, diberikan penghargaan dan imbalan plus. Sebaliknya, partai dan gerakan sosial yang tidak sejalan dengannya, diawasi, dibatasi bahkan dibekukan secara refresif. Dalam rangka memudahkan sosialisasi kebijakannya, bagian penyiaran dan media massa dinasionalisasikan, pengarang, penulis, satrawan, dan semua yang terlibat dalam penyebaran informasi dijadikan pegawai negara.

Dalam bidang pendidikan, Nasser berupaya dengan berbagai gaya dan strategi merangkul al-Azhar dengan para ulamanya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang sangat berpengaruh di Mesir. Menurutnya, dengan menguasai al-Azhar akan memudahkan mengendalikan kekuatan massa karena pengaruh ulama di tengah masyarakat Mesir. Ulama memiliki kedudukan yang sangat terhormat, disegani, dan dianggap sebagai orang yang mempunyai kapasitas ilmu agama untuk memutuskan hukum berbagai persoalan, sehingga memungkinkan untuk memobilisasi kekuatan publik. Karena itu, al-Azhar dinasionalisasikan menjadi lembaga pendidikan modern dengan melibatkan ulama-ulama yang kharismatik dan staf pegawainya dalam birokrasi negara dengan nominal gaji yang sangat fantastik dari anggaran belanja negara. Dalam hal pendanaan pendidikan, Nasser membebaskan biaya sekolah dengan memberikan beasiswa kepada pelajar Mesir di semua jenjang pendidikan, bahkan banyak pengiriman pelajar Mesir ke luar negeri dalam upaya mengikuti kemajuan sains dan teknologi dunia modern.

Pada tahap awal kepemimpinannya, Nasser banyak mendemonstrasikan gaya dan tehnik kepemimpinan yang bertameng agama. Fenomena ini dapat dilihat dari berbagai kebijakannya yang menggu-

nakan dan memanfaatkan simbol-simbol ajaran Islam untuk memuluskan perjalanan ideologi nasionalisme dan sosialisme yang dikembangkannya. Gaya kepemimpinan tersebut, banyak memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap demokratisasi pelaksanaan sistem pendidikan nasional Mesir, sebab pendidikan hanya dijadikan alat politik untuk menciptakan stabilitas dan meraih kepentingan politik negara.

Formasi kurikulum di sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi harus mendukung program pembangunan dan politik yang telah ditetapkan oleh dewan revolusioner. Semua lembaga pendidikan swasta dan asing dinasionalisasikan agar mudah dikendalikan melalui pengawasan ketat para aparaturnegara. Kebijakan pendidikan yang sepihak ini, di satu sisi telah menjadikan sistem pendidikan nasional Mesir sebagai eskalator pemaksaan kehendak pemerintah, karena rakyat Mesir berada dalam tekanan dan paksaan mentaati sistem pendidikan yang bertendensikan politik kekuasaan pemerintahan Nasser. Di pihak lain, melalui kebijakan politik pendidikan ini, Nasser ingin meraih reputasi dan mempertinggi statusnya sebagai pemimpin Arab, khususnya pemimpin Mesir modern dengan memberikan kontribusinya terhadap gerakan modernisasi secara luas.

### **Reformasi Sistem Pendidikan Mesir Revolusioner**

Peralihan kekuasaan dari Raja Farouq kepada Nasser melalui revolusi tanggal 23 Juli 1952 mengandung konsekuensi yang cukup berat bagi Nasser dalam menata kembali semua aspek kehidupan bernegara di Mesir, khususnya masalah pendidikan tradisional-klasik yang telah mengakar kuat selama berabad-abad di berbagai lembaga pendidikan Islam yang terdapat di lingkungan masyarakat Mesir. Di antara kriteria sistem pendidikan Islam tradisional-klasik yang mengakar kuat di Mesir adalah keberhasilan siswanya ditentukan oleh ujian tahunan, sehingga siswa tidak belajar secara kreatif dan berkelanjutan, tidak tertarik mengembangkan kemampuan fisik dan mental secara disiplin. Karena itu, pelaksanaan pendidikan bagi siswanya tidak lebih pada persiapan untuk

menghadapi ujian tahunan dengan menjejalkan hafalan dan informasi faktual yang tertulis dalam catatan kuliah dan buku pelajaran (Joseph Szyliowics, 2001: 370).

Pembaharuan sistem pendidikan nasional Mesir pada era revolusioner yang paling menonjol daripada masa pemerintahan sebelumnya adalah reformasi kurikulum dengan memberlakukan formasi kurikulum nasional dalam bidang sains umum, membuka sekolah kejuruan profesional, dan membangun sekolah tehnik untuk mempersiapkan tenaga tehnik dalam proses pembangunan. Pada jenjang perguruan tinggi, termasuk di al-Azhar, Nasser menginstruksikan pengadopsian sains dan teknologi Barat dengan membuka fakultas umum konfensional, agar sistem pendidikan nasional Mesir mampu mencetak sarjana-sarjana bertaraf internasional yang dapat bersinergi dengan kemajuan peradaban modern dalam menguasai sains dan teknologi.

Kontribusi besar yang telah diberikan oleh pemerintah revolusioner Mesir terhadap pemabaharuan sistem pendidikan nasional Mesir yang sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik tidak dapat dinisbikan. Di antara upaya-upaya penataan kembali sistem pendidikan nasional yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Mesir revolusioner, yaitu; menyeragamkan kurikulum secara nasional dengan penambahan pelajaran umum, pemerataan kesempatan belajar dengan pembebasan uang sekolah di seluruh tingkat sekolah, dan pendirian sekolah kejuruan dan akademi profesi.

Dalam bidang pendidikan, secara umum penguasa revolusioner telah mempertahankan kebijakannya untuk sekolah pemula selama 30 tahun terhitung sejak revolusi tahun 1952 sampai 1982. Di antara kebijakan yang dilakukan untuk mempercepat perubahan dan kemajuan dunia pendidikan di Mesir, yaitu:

1. Pemerataan kesempatan belajar di semua tingkat pendidikan dari sekolah pemula sampai universitas;

2. Merencanakan kebijakan pendidikan yang berbasis kepada kemampuan dan kebutuhan negara;
3. Pengembangan pendidikan teknik dan kejuruan di tingkat menengah untuk mempersiapkan tenaga teknis di seluruh aspek pembangunan Mesir;
4. Dukungan yang besar kepada universitas, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan umum atau sains (P. J. Vatikiotis, 1986: 478).

Pemerintah revolusioner melakukan pembaharuan sistem pendidikan Mesir melalui beberapa undang-undang kebijakan presiden Nasser, yaitu; UU No. 210 tahun 1956 tentang pemberlakuan sekolah pemula terpadu secara resmi, UU No. 213 tahun 1956 tentang perpanjangan masa pendidikan sekolah dasar dari 4 tahun menjadi 6 tahun, memberikan kenaikan kelas secara otomatis, jika telah mengikuti 75 % pelajaran tanpa melalui ujian tahunan sebagaimana sistem sebelumnya, dan merombak kurikulum tradisional dengan memasukkan pelajaran, matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris, kesehatan, ekonomi, dan sosial pada sekolah menengah nasional.

Pada awal reformasi sistem pendidikan nasional Mesir, paling tidak terdapat 3 tahap yang telah dilakukan pemerintah Mesir revolusioner, yaitu:

1. Fase perencanaan sistem pendidikan nasional yang meliputi penerimaan siswa sekolah pemula secara merata di seluruh wilayah Mesir dan peningkatan kemajuan sekolah menengah dengan pembukaan sekolah teknik dan kejuruan;
2. Fase politisasi sekolah dengan menghubungkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara dan pembangunan nasional Mesir. Tahun 1961, institut perencanaan nasional dibentuk sebagai lembaga penelitian dan pelatihan dalam bidang pendidikan.
3. Fase sosialisasi yang banyak berhubungan dengan kepentingan politik pemerintah, karena dunia pendidikan dijadikan media untuk



mensosialisasikan ideologi sosialisme yang diperjuangkan oleh pemerintah Mesir revolusioner Nasser.

Pada tingkat perguruan tinggi, Nasser mengusahakan persamaan antara universitas swasta, seperti al-Azhar dengan lembaga perguruan tinggi negeri, sehingga lulusannya memiliki standar kualitas nasional dan dapat menikmati peluang dan kesempatan kerja yang sama dengan universitas negeri milik pemerintah. Dengan usaha ini, pada periode berikutnya al-Azhar mampu tampil sebagai tipologi lembaga pendidikan tinggi modern yang tidak hanya berbasis agama, tetapi juga berbasis sains umum yang berstandar internasional.

### **Pemerataan Pendidikan yang Berwawasan Kebangsaan**

Menurut Nasser ada dua revolusi bagi setiap bangsa yang berdaulat, yaitu revolusi politik dan revolusi sosial. Dari prinsip revolusi Nasser, dipahami bahwa tujuan revolusi yang dikembangkan adalah mengadakan perubahan radikal pada kehidupan rakyat Mesir, salah satunya adalah perubahan *milliu* dunia pendidikan. Karena itu, penyelegaraan sistem pendidikan Mesir harus dseragamkan di bawah pengendalian penuh pemerintah revolusioner dari pendidikan tingkat pemula sampai perguruan tinggi.

Pembaharuan yang mendasar dalam sistem pendidikan Mesir revolusioner adalah pemerataan kesempatan belajar kepada seluruh rakyat Mesir, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sistem pendidikan pada masa Nasser bersifat inklusif-universal yang diperuntukkan bagi seluruh pelajar yang menuntut ilmu di Mesir, baik dari dalam maupun dari luar negeri Mesir. Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem pendidikan pada masa pemerintahan Raja Farouq sebelumnya, dimana pendidikan lebih banyak diperuntukkan dan dinikmati oleh anak-anak jutawan-kaya, elit-politik bangsa dan teknokrat-penguasa negara.

Dalam proses transformasi pendidikan, Nasser mulai merancang kurikulum dari tingkat sekolah pemula dengan pelajaran wajibnya, yaitu tentang nasionalisme dan sosialisme arab yang harus diikuti oleh semua

pelajar. Pelajar dididik bekerjasama dengan pemerintah dalam meraih tujuan kehidupannya melalui politik pendidikan. Pada era ini, siswa diwajibkan mempelajari materi dan teksbook yang menekankan pada kesadaran kebangsaan dan kebijakan politik Nasser. Karena itu, menjadi fenomena yang lazim di kalangan pelajar sekolah pemula, menengah sampai perguruan tinggi di Mesir, mempelajari ideologi politik negara dan latihan militer di lembaga pendidikan formal.

Pada tingkat sekolah pemula, kurikulum pendidikan nasional dimaksudkan untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan kecintaan siswa terhadap bangsa dan pemimpinnya melalui slogan-slogan dan lagu-lagu nasionalisme. Pada sekolah tingkat menengah mulai diberikan pelajaran latihan kemiliteran setiap minggu dan di perguruan tinggi pada tiga tahun pertama perkuliahan diwajibkan mengikuti latihan militer selama dua jam perminggu. Guru di Mesir diwajibkan mengajarkan siswanya tentang semangat kebangsaan dan kecintaan pada pemeritahan Nasser melalui lagu yang selalu dilantunkan sebelum dan sesudah belajar di sekolah, yaitu; *Nasser, all of us love you, we remain by your side, Nasser, leader of us, oh Nasser* (Derek Hopwood, 1991:136).

### **Reorganisasi Lembaga Pendidikan Mesir**

Gerakan reorganisasi lembaga pendidikan mulai dilaksanakan sejak tahun 1956, sehingga banyak sekolah Inggris dan Prancis dinegerikan. Tahun 1958, semua sekolah asing yang ada di Mesir dinasionalisasikan sesuai dengan sistem pendidikan pemerintahan revolusioner Mesir. Sebagai konsekwensinya, semua guru dan pengelola lembaga pendidikan asing wajib mengikuti sistem pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Nasser.

Demikian pula halnya dengan universitas, dilakukan penataan kembali terhadap pengelolaan lembaga pendidikan dan orientasi universitasnya. Kebijakan pemerintah revolusioner Mesir berkaitan dengan eksistensi universitas adalah kebijakan bulan Juli 1962 tentang demokratisasi perguruan tinggi dan penghapusan biaya pendidikan tinggi umum dengan pemberian dana pendidikan dalam jumlah besar kepada

mahasiswa miskin yang ingin melanjutkan studi ke universitas umum (Peter Mansfield, 1973: 246). Kebutuhan tenaga kerja juga menjadi penentu bagi sarjana yang memiliki keahlian tertentu, khususnya sains, tehnik mesin, pertanian, dan kedokteran dalam mengikuti pendidikan, agar tujuan pembangunan nasional Mesir tercapai dengan sumber daya manusia dari hasil sistem pendidikan Mesir modern.

Sebagai implikasi dari kebijakan tersebut, rekapitulasi tahunan penerimaan mahasiswa menunjukkan peningkatan yang sangat sporadis di semua universitas, seperti; Kairo, Aleksandaria, Ain Syam, bahkan universitas tidak mampu mengimbangi animo pelajar Mesir untuk masuk perguruan tinggi. Sebagai konsekwensinya, maka pemerintahan revolusioner Mesir membuka jalur pendidikan di luar universitas, yaitu Institut Profesi yang memiliki kualitas dan peluang kerja yang sederajat dengan universitas.

Di samping implikasi tersebut, kebijakan pendidikan tinggi pemerintah revolusioner juga memberikan pengaruh terhadap keberadaan al-Azhar sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terhormat yang memegang kuat tradisi intelektualnya melalui metode menghafal dan dikelola oleh para ulama serta syekh. Di era revolusioner ini, al-Azhar menjadi perguruan tinggi terintegritas dengan sistem pendidikan nasional Mesir revolusioner. Dengan demikian, al-Azhar mengalami banyak perubahan, baik pada administrasi kelembagaan maupun muatan kurikulum dan strategi perkuliahannya.

Pembenturan kebijakan pemerintah Nasser terhadap al-Azhar, menjadikan lembaga pendidikan tinggi Islam ini kehilangan kharakteristik utamanya, dimana selama berabad-abad dikelola oleh para ulama dengan sistem pendidikan klasiknya sebagai tempat mencetak ulama harus mengalami pengalaman pahit dengan pengalihan pengelolaan kepada aparatur negara yang diangkat dan terlibat praktis dalam birokrasi pemerintahan Nasser dengan sistem manajemen modern. Kurikulum dan lembaga al-Azhar direorganisasikan, agar sejalan dengan tujuan pembangunan dan sistem pendidikan nasional Mesir modern dengan pengawasan ketat dari pemerintahan revolusioner.

Reorganisasi al-Azhar berjalan mulus seiring dengan sistem pendidikan nasional Mesir modern sangat didukung oleh peran Muhammad Syaltut ketika menjadi rektor al-Azhar. Dalam banyak kebijakannya tentang pembaharuan al-Azhar banyak berapilisasi dengan pemerintah revolusioner Mesir sampai puncak reorganisasinya tahun 1961 melalui UU No. 103 yang mewajibkan al-Azhar melakukan penataan menyeluruh terhadap semua sistem pendidikannya.

Pada masa ini, sejarah perubahan besar dan radikal terjadi di al-Azhar, yaitu dengan pembukaan 4 fakultas umum (kedokteran, pertanian, teknik, dan mipa), kemudian al-Azhar juga dituntut untuk merorganisasi semua kurikulum dan lembaga yang ada di bawah pengendaliannya. Perubahan ini pada dasarnya untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi al-Azhar pada era revolusioner, seperti semakin bertambahnya mahasiswa al-Azhar yang tidak mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang ada di Mesir (Fazlur Rahman, 1987: 129).

Di satu sisi, perubahan al-Azhar ini telah mengurangi kehormatan al-Azhar sebagai prototipe lembaga pendidikan Islam yang ideal, menjadikan ulama dan syekhnya hanya sebagai simbol saja, karena pemerintahan Nasser menempatkan semua administrasi al-Azhar pada orang-orang birokrasi yang tidak mendapatkan apresiasi terhormat dari rakyat Mesir. Al-Azhar sering dijadikan “boneka mainan” oleh rezim penguasa revolusioner untuk mendapatkan legitimasi para ulama dan syekhnya, sama dengan kondisi al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah dengan faham Syi’ahnya dan Dinasti Ayubiyah dengan faham Sunninya (Nuryadin, 2000: 59-61).

Di sisi lain, Kebijakan pemerintah revolusioner tersebut telah memberikan sumbangan besar terhadap kemajuan al-Azhar, seperti pengakuan alumninya dengan sertifikasi ijazah yang disamakan dengan universitas umum lainnya dan pemberian kesempatan kerja seluas-luasnya kepada alumni dalam proses pembangunan Mesir modern, khususnya di bidang tehnik. Periode selanjutnya, al-Azhar cenderung tampil sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang modern dan kosmopolitan dengan perhatian yang intens dari pemerintah melalui

pengalokasian anggaran yang cukup besar dan manajemen kelembagaannya yang profesional, sehingga mampu menjadi simbol kemajuan intelektual dan peradaban umat Islam di seluruh belahan dunia (Nursamad Kamba, t.t: 63).

Secara umum, yang patut dicatat dari kebijakan pemerintahan Nasser terhadap reorganisasi universitas di Mesir adalah keberhasilannya dalam meningkatkan standar kualitas sarjana dan intelektual Mesir yang banyak bertebaran di seluruh dunia sekaligus sebagai jembatan penyebaran wacana ke-Islam-an. Sistem pendidikan Mesir tidak hanya mampu mencetak sarjana dan intelektual yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam, tetapi juga mampu mencetak kaum intelektual yang berwawasan sains modern yang menjadi pilar pembangunan bangsa dan peradaban rakyat Mesir modern.

## **PENUTUP**

Sistem pendidikan Mesir revolusioner banyak diwarnai oleh kebijakan politik pemerintah dalam rangka menggalang dukungan rakyat Mesir dari aspek dunia pendidikan. Pendidikan diorientasikan sesuai dengan tujuan politik, stabilitas, sosial dan ekonomi untuk membantu pembangunan nasional menuju Mesir modern.

Reformasi sistem pendidikan nasional di Mesir telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan terhadap perkembangan dunia pendidikan, tidak hanya dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang sains umum dan teknologi. Kebijakan ini ditempuh oleh pemerintah revolusioner Nasser, agar sistem pendidikan Mesir modern dapat bersinergi dan mengikuti kemajuan dunia pendidikan di negara lain, khususnya di dunia Barat.

Secara praktis, modernisasi dunia pendidikan yang telah dilakukan pemerintah Mesir revolusioner, meliputi pemberlakuan kurikulum secara nasional, penentuan jejang dan masa belajar secara sistematis di semua tingkat sekolah dan universitas, pemerataan kesempatan belajar dengan pembebasan biaya pendidikan, dan reorganisasi lembaga pendidikan

asing, swasta, dan universitas al-Azhar sebagai bagian integral dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional pemerintahan revolusioner.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Depag RI. 1993. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta.
- Eposito, Jhon L, 1986. *Identitas Islam*, Terj. Abdurrahman Zainudin, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hopwood, Derek. 1991. *Eghpt, Poloitic and society 1945-1990*, London: Harper Cillions Academic.
- Kamba. Nursamad. t.t. “Belajar di Universitas al-Azhar” dalam *Belajar Islam di Timur Tengah* (Jakarta: Depag RI).
- Mansfield. Peter (ed). 1973. *The Middle East: A Political and Economic Survey*, Vol. 4 (London: Oxford Uviversity Press.
- Nuryadin, 2000. “Al-Azhar: Antara Reformasi dan Konserfatisme” dalam *Jurnal: Taswirul Afkar*, Edisi No. 8 Tahun 2000, Jakarta: LAKPESDAM.
- Ropi, Ispatu dan Kusuma. 2000. *Belajar Islam di Timur Tengah*, Jakarta: Depag RI.
- Rahman. Fazlur. 1987. *Islam dan Medernity: Transformation of An Intelectual Tradition* Chicago: The University of Chicago Press.
- Syzliowics, Joseph S. 2001. *Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam*, Terj. Murniwanti w, Surabaya: Al-Ikhlis.
- Woodward, Peter. 1992. *Profiles in Power Nasser* (New York: Longman.
- Vatikiotis, P.J. 1986. *The modren History of Egypt*, USA: The Jons Hopkinds University Press.